

ABSTRAK SKRIPSI

Dewasa ini dengan semakin majunya teknologi dan makin tingginya taraf hidup masyarakat akan membuat semakin banyak dan beragamnya kebutuhan masyarakat. Banyak badan usaha yang berdiri dan hal ini menyebabkan tingkat persaingan antara badan usaha yang baru dan badan usaha yang sudah lama berdiri semakin tajam.

PT."X" merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang industri sepatu dengan berbagai merk, dimana penjualan ditujukan untuk pasar domestik. Tujuan dari dilakukan audit piutang usaha pada PT."X" ini adalah untuk menilai pengendalian internal serta juga upaya untuk mencegah kecurangan saat pengumpulan piutang.

Permasalahan yang terdapat pada badan usaha ini adalah: pemberian kredit dilakukan oleh general manager, dimana dalam pemberian kredit ini kebijaksanaan yang diterapkan kadang ketat kadang longgar. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat patokan yang jelas mengenai batas pemberian kredit. Langgan biasanya langsung meminta kredit pada general manager, dan general manager langsung menyetujui dengan alasan kenal baik dengan langgan tersebut.

Penagihan pada PT."X" dilakukan oleh salesman. Hasil tagihan ini dapat berupa uang tunai atau bilyet giro, kemudian diserahkan kepada kasir dan oleh kasir dicatat hasil penerimaan tersebut pada kartu piutang. PT."X" juga mewajibkan salesman untuk mempertanggungjawabkan hasil penagihan pada hari itu juga atau esok paginya paling lambat.

Laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, karena piutang yang ada pada badan usaha dinilai terlalu besar.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah bahwa badan usaha hendaknya membuat bagian kredit sendiri sehingga dapat diketahui plafon kredit untuk masing-masing langgan. Hal ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah piutang yang tak tertagih sebagai akibat dari pemberian kredit yang tidak didasarkan pada plafon kredit untuk tiap-tiap langgan.

Salesman sebagai petugas pencari order hendaknya jangan diberikan tugas juga untuk menagih. Hasil penerimaan dari salesman diberikan kepada kasir dimana kasir sebagai

petugas penyimpan uang juga berfungsi sebagai pencatat penerimaan kas. Seharusnya badan usaha tidak melakukan penggabungan fungsi antara pencari order dan penagihan.

